

## ABSTRAK

**Rahmi, 2023. 1193030081. Bantuan Hukum Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Implikasinya Terhadap Jaminan Hukum Di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Maliyah**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin memiliki hak dan kewajiban menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi pada realitanya masih banyak pemohon bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak terkabulkan, tetapi yang tertangani hanya ada 66 perkara dari 1000 pemohon yang dikabulkan dari tahun pelaksanaan 2019-2022. Padahal setiap pemohon seharusnya mendapatkan hak yang sama sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis penentuan anggaran dana APBD untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin *kedua*, mengetahui mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tentang bantuan hukum masyarakat miskin, *ketiga* mengetahui bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap penentuan anggaran dana APBD dan mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini menggunakan beberapa teori. yaitu: teori kewajiban negara menurut al-Mawardi kepala negara sebagai “Pengganti Rasul” yang memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara, yang melindungi keutuhan agama, menerapkan hukum berperkar, melindungi wilayah negara yang suci dan menegakkan supremasi hukum serta memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. teori kewenangan Teori kewenangan yang meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan antara lain atribusi, delegasi, dan mandat. serta teori keuangan negara dalam Siyasah Maliyah menurut almawardi membagi pokok pokok bahasan yaitu pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pengawasan terhadap sumber pendapatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: *pertama*, penentuan anggaran dana APBD untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan itu disesuaikan dengan keputusan bupati Tasikmalaya Nomor 180 / kep. 38 – Huk / 2019 yang berbunyi bahwa besaran anggaran bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan jenis perkara litigasinya yakni dikenakan biaya 3.500.000. *Kedua*, mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan itu dilihat dari setiap individu yang menjadi pemohon dimana secara kriteria termasuk orang miskin serta dibuktikan dengan identitas kependudukan Kabupaten Tasikmalaya yang sah dan secara kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin. *Ketiga*, tinjauan siyasah maliyah terhadap penentuan anggaran dana APBD dan mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan teori keuangan negara .

**Kata kunci:** *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Bantuan Hukum; Peraturan daerah; Siyasah Maliyah*